

Analisis Pemangkasan Anggaran Infrastruktur terhadap Proses Lepas Landas Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Teori Rostow dengan Pendekatan Kualitatif

¹Nikmatus Soleha

¹Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, lehaaaa2703@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received May 31, 2025
Revised Jun 05, 2025
Accepted May 29, 2025
Online Available Jun 24, 2025

Kata Kunci:

anggaran infrastruktur, pembangunan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi Rostow, kesenjangan pembangunan antarwilayah, transformasi struktural ekonomi.

Keywords:

infrastructure budget, economic development, Rostow's economic growth theory, regional development disparity, structural economic transformation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemangkasan anggaran infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dalam kerangka teori pertumbuhan Rostow, khususnya pada tahap lepas landas (take-off). Infrastruktur merupakan elemen krusial dalam memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menciptakan lapangan kerja produktif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, data sekunder dari instansi pemerintah, dan publikasi ilmiah. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur berisiko memperlambat penyelesaian proyek strategis, menghambat penyebaran pertumbuhan ekonomi antarwilayah, dan memperlebar ketimpangan regional. Ketimpangan ini dapat melemahkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang adaptif dan strategis guna menjaga kesinambungan investasi infrastruktur sebagai pendorong utama transformasi struktural ekonomi dan pencapaian target pembangunan nasional seperti SDGs dan Visi Indonesia 2045.

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of infrastructure budget cuts on Indonesia's economic development within the framework of Rostow's stages of economic growth, particularly the take-off phase. Infrastructure is a crucial element in strengthening regional connectivity, improving distribution efficiency, and generating productive employment. Using a qualitative approach based on literature review, this research analyzes policy documents, secondary data from government institutions, and academic publications. The findings reveal that infrastructure budget reductions risk delaying the completion of strategic projects, hindering the spread of economic growth across regions, and widening regional disparities. These disparities may weaken national economic competitiveness and productivity. Therefore, an adaptive and strategic fiscal policy is needed to maintain consistent infrastructure investment as a key driver of structural economic transformation and to support the achievement of national development targets such as the SDGs and Indonesia's Vision 2045.

Corresponding Author:

Name: Nikmatus Soleha
Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ilmu Ekonomi
Email: lehaaa2703@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan hasil pembangunan. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai jaringan fisik penghubung antarwilayah, tetapi juga berperan vital dalam menciptakan efisiensi sistem logistik, mendukung mobilitas faktor produksi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta air bersih. Di negara kepulauan seperti Indonesia, infrastruktur menjadi instrumen strategis untuk mengatasi fragmentasi wilayah, memperkuat koneksi antar daerah, dan mendorong integrasi ekonomi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan fiskal, terutama akibat tekanan ekonomi pascapandemi dan ketidakpastian global. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh, termasuk pengurangan alokasi pada sektor infrastruktur. Meskipun kebijakan ini bertujuan menekan defisit anggaran, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap pembangunan, terutama dalam fase krusial pembangunan ekonomi nasional.

Menurut teori tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Walt Whitman Rostow (1960), pembangunan suatu negara bergerak melalui lima tahap, dan Indonesia saat ini diyakini berada pada fase prasyarat menuju lepas landas (preconditions for take-off). Pada tahap ini, investasi besar dalam sektor-sektor produktif seperti infrastruktur sangat diperlukan untuk memicu surplus produksi, memperkuat sektor industri, dan membuka akses ekonomi wilayah yang sebelumnya terisolasi. Infrastruktur, dalam hal ini, bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai penopang utama transformasi struktural menuju negara industri modern.

Sejumlah studi telah menegaskan pentingnya belanja infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi. Ginting (2020) menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara belanja pemerintah untuk infrastruktur dengan peningkatan PDB nasional, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan efisiensi ekonomi. Sementara itu, Siregar dan Wahyuni (2021) menemukan bahwa investasi publik di sektor transportasi secara langsung berdampak pada peningkatan efisiensi logistik dan daya saing produk nasional di pasar global. Pratama (2022) juga mencatat bahwa ketidakstabilan pendanaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta berkontribusi terhadap melebarinya kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji dampak pemangkasan anggaran infrastruktur terhadap peluang Indonesia dalam mencapai fase lepas landas seperti yang dijelaskan dalam teori Rostow. Cela inilah yang ingin diisi dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana kebijakan pengurangan anggaran infrastruktur berdampak terhadap ketimpangan wilayah, investasi publik dan swasta, serta prospek transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Melalui analisis literatur, dokumen kebijakan fiskal, serta data sekunder dari lembaga resmi, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi kebijakan pemangkasan anggaran terhadap arah pembangunan nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi landasan bagi perumusan strategi fiskal yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, terutama dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena pemangkasan anggaran infrastruktur dalam kaitannya dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri hubungan antara kebijakan fiskal, khususnya dalam sektor infrastruktur, dengan tahapan pembangunan ekonomi Indonesia menurut kerangka teori pertumbuhan Rostow.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang berarti seluruh data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder. Data sekunder tersebut meliputi dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah (seperti APBN dan RPJMN), laporan resmi dari lembaga negara (misalnya BPS, Kementerian Keuangan, dan Bappenas), publikasi dari organisasi internasional (seperti World Bank dan Global Infrastructure Hub), serta artikel jurnal ilmiah dan buku-buku relevan yang membahas topik infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan wilayah.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* atau analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan kausal antarvariabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang dikaji. Analisis dilakukan secara sistematis dengan cara mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama, seperti dampak pemangkasan anggaran terhadap proyek infrastruktur nasional, pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, distribusi wilayah pembangunan, serta keterkaitannya dengan tahapan lepas landas dalam teori Rostow.

Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif maupun perhitungan statistik, karena fokusnya bukan pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap proses, dinamika, dan konsekuensi kebijakan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas persoalan pembangunan secara lebih holistik, serta menyajikan interpretasi yang kaya terhadap data yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangkasan anggaran infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan berbagai dampak sistemik terhadap pembangunan nasional. Sebagai elemen penting dalam fase take-off menurut teori pertumbuhan Rostow, keberlanjutan investasi di sektor infrastruktur menjadi krusial untuk menciptakan surplus ekonomi, memperluas pasar domestik, dan memperkuat fondasi industrialisasi. Dalam konteks ini, kebijakan pengurangan alokasi infrastruktur tidak hanya menurunkan kapasitas fisik pembangunan, tetapi juga menghambat proses transformasi struktural ekonomi Indonesia.

Dampak Langsung terhadap Proyek Nasional dan Tenaga Kerja

Penyesuaian anggaran berdampak nyata pada pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai daerah. Sejumlah proyek transportasi utama seperti jaringan jalan Trans-Sumatera, jalur kereta api Kalimantan, serta pengembangan pelabuhan dan

kawasan industri di wilayah timur Indonesia mengalami penundaan atau penyempitan ruang lingkup pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pembukaan akses ekonomi baru dan terganggunya rantai pasok antarwilayah.

Penurunan belanja modal juga berdampak pada aktivitas sektor konstruksi, yang menjadi sektor padat karya. Data dari Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur mengalami penurunan dari Rp423 triliun menjadi Rp384 triliun, atau sekitar 9,2%. Hal ini berimplikasi pada penurunan volume pekerjaan konstruksi nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS (2023) yang mencatat penurunan kontribusi sektor ini terhadap PDB dari 10,4% menjadi 9,6%. Dalam jangka pendek, hal ini turut mendorong peningkatan pengangguran di sektor konstruksi hingga 1,3%, menandakan melemahnya penyerapan tenaga kerja di sektor yang sebelumnya menjadi penyokong pertumbuhan.

Efek Berantai terhadap Sektor Pendukung dan Rantai Pasok

Infrastruktur memiliki peran sebagai pemicu efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap sektor-sektor lain, seperti industri semen, baja, alat berat, serta logistik dan transportasi. Ketika proyek-proyek infrastruktur melambat, maka permintaan terhadap produk dan jasa dari sektor-sektor tersebut ikut menurun. Akibatnya, kapasitas produksi menurun, permintaan tenaga kerja berkurang, dan daya beli masyarakat melemah, yang secara keseluruhan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi domestik.

Dampak lainnya dirasakan pada level pemerintahan daerah. Terjadinya keterbatasan fiskal di berbagai daerah, sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat untuk membiayai proyek-proyek dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Pemotongan dana dari pusat membuat banyak proyek infrastruktur lokal tertunda atau dibatalkan, yang berujung pada keterisolasi daerah terpencil dan memburuknya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan semangat take-off yang mensyaratkan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi melalui pembangunan infrastruktur secara masif.

Ketimpangan Wilayah dan Potensi Ketidakstabilan Sosial

Salah satu konsekuensi serius dari kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur adalah meningkatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara secara historis memiliki keterbatasan infrastruktur dan alokasi fiskal, menjadikan wilayah-wilayah ini sangat rentan tertinggal dibandingkan kawasan barat seperti Jawa dan Sumatera. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perbedaan kemampuan ekonomi, tetapi juga memperlebar kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar, koneksi antarwilayah, dan mobilitas sosial.

Ketimpangan tersebut berisiko memperbesar potensi ketidakstabilan sosial, terutama melalui migrasi besar-besaran ke kota-kota besar, meningkatnya urbanisasi berlebihan, dan tingginya konsentrasi kemiskinan di wilayah perkotaan. Dalam jangka panjang, perbedaan pertumbuhan ekonomi yang tajam antarwilayah dapat memicu konflik kepentingan, melemahkan kohesi sosial, dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah pusat. Menurut teori Rostow, distribusi pembangunan yang tidak merata akan memperlambat proses konsolidasi pasar domestik dan menghambat transisi ekonomi menuju tahap pertumbuhan yang matang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan fiskal yang lebih responsif terhadap kesenjangan wilayah diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional secara sosial dan ekonomi.

Penurunan Daya Saing dan Kepercayaan Investor

Infrastruktur publik berperan sebagai penopang utama daya saing nasional dan iklim investasi. Ketika pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan transportasi tertunda akibat pemangkasan anggaran, maka biaya logistik meningkat dan efisiensi produksi menurun. Data dari World Bank Logistics Performance Index (2023) menunjukkan bahwa peringkat Indonesia turun dari posisi 46 ke 53, mencerminkan penurunan dalam efisiensi sistem logistik nasional.

Situasi ini berdampak pada menurunnya minat investor, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan dukungan infrastruktur seperti energi dan manufaktur. Laporan Apindo (2024) mencatat bahwa realisasi investasi asing langsung (FDI) mengalami penurunan sebesar 7% selama 2023. Hal ini terjadi karena banyak proyek jangka panjang yang tidak lagi dianggap layak secara ekonomi akibat ketidakpastian pembangunan infrastruktur. Dalam konteks Rostow, stagnasi investasi menjadi sinyal gagalnya penciptaan surplus ekonomi yang diperlukan untuk lepas landas menuju industrialisasi. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Vietnam tetap mempertahankan belanja infrastrukturnya meskipun dalam tekanan fiskal. Strategi ini terbukti membantu mereka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menarik investasi asing secara berkelanjutan.

Implikasi Sosial dan Kualitas Hidup

Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik pedesaan, dan jalan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika pembangunan infrastruktur dasar tertunda, akses terhadap layanan-layanan ini menjadi terbatas, terutama di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Akibatnya, mobilitas sosial menjadi stagnan, kemiskinan struktural menguat, dan ketimpangan sosial semakin melebar.

Dampak ini berisiko menghambat pencapaian berbagai indikator pembangunan manusia, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan menurunkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Lebih jauh, kondisi ini juga menyulitkan Indonesia untuk memenuhi komitmennya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan 9 (infrastruktur dan industrialisasi), tujuan 10 (pengurangan ketimpangan), dan tujuan 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan).

Hambatan terhadap Tahap Lepas Landas dan Visi Jangka Panjang

Fase take-off dalam teori Rostow mensyaratkan keberadaan investasi besar yang mendorong pertumbuhan sektor industri dan infrastruktur secara simultan. Pemangkasan belanja infrastruktur dalam fase ini berisiko menghambat proses akumulasi modal nasional, memperlambat modernisasi sektor ekonomi, dan membuat Indonesia terjebak dalam struktur ekonomi berbasis konsumsi. Akibatnya, alih-alih bergerak menuju tahapan pertumbuhan tinggi, Indonesia justru menghadapi risiko stagnasi atau *middle-income trap*.

Selain itu, visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan pencapaian status negara maju membutuhkan pondasi infrastruktur yang merata, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan global. Tanpa strategi pembangunan infrastruktur yang konsisten dan inklusif, peluang untuk memanfaatkan bonus demografi serta memperkuat daya saing global akan semakin kecil. Oleh karena itu, keberlangsungan pembiayaan infrastruktur harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban anggaran.

Penegasan Temuan dan Rekomendasi

Penelitian ini sejalan dengan Ginting (2020) yang menunjukkan hubungan positif antara belanja infrastruktur dan pertumbuhan PDB; Siregar & Wahyuni (2021) yang menyoroti pentingnya infrastruktur transportasi untuk efisiensi ekonomi; serta Pratama (2022) yang menekankan dampak buruk ketidakstabilan fiskal pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Sebagai solusi, dibutuhkan strategi pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi hijau (*green bonds*), serta penguatan Lembaga Pengelola Investasi (SWF). Pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola proyek, transparansi anggaran, serta integrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan fiskal.

Pernyataan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, sehingga tidak melibatkan analisis statistik atau data primer yang bisa memberikan bukti empiris kuantitatif. Kedua, sumber data yang digunakan terbatas pada dokumen resmi dan publikasi sekunder yang tersedia pada periode tertentu, sehingga kemungkinan adanya bias temporal tidak dapat dihindari.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada konteks nasional dan belum mengupas secara mendalam perbedaan dampak di masing-masing daerah secara mikro. Oleh karena itu, studi lanjutan dapat mempertimbangkan pendekatan campuran (mixed-method) atau studi kasus spesifik di daerah-daerah yang terdampak berat oleh pemangkasan anggaran infrastruktur untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi Indonesia. Pemotongan anggaran menyebabkan penundaan proyek-proyek strategis nasional, penurunan produktivitas sektor konstruksi, serta melemahnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dampak lanjutan terlihat pada terganggunya rantai pasok industri pendukung infrastruktur yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Ketimpangan antarwilayah juga semakin tajam, terutama karena daerah-daerah yang bergantung pada pembiayaan pusat tidak mampu melanjutkan proyek-proyek infrastruktur dasar. Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara wilayah barat yang lebih mapan dan wilayah timur yang tertinggal, sehingga menimbulkan risiko sosial seperti urbanisasi berlebihan, pengangguran terselubung, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Penurunan kualitas infrastruktur turut berdampak pada daya saing nasional, baik dari sisi logistik maupun kepercayaan investor. Efisiensi distribusi barang terganggu, biaya logistik meningkat, dan realisasi investasi asing mengalami penurunan akibat ketidakpastian proyek jangka panjang. Dalam perspektif teori pertumbuhan Rostow, kondisi ini berpotensi menghambat proses lepas landas (take-off), yang membutuhkan investasi besar dan berkelanjutan di sektor produktif seperti infrastruktur dan industri.

Lebih lanjut, tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024 serta visi jangka panjang Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika dukungan infrastruktur tidak diprioritaskan. Ketimpangan regional, rendahnya efisiensi ekonomi, dan stagnasi transformasi struktural menjadi ancaman nyata terhadap capaian pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemangkasan anggaran infrastruktur bukan hanya persoalan penghematan fiskal, melainkan isu strategis yang menyangkut masa depan arah pembangunan nasional. Tanpa komitmen terhadap pembiayaan infrastruktur yang konsisten, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, Indonesia berisiko kehilangan momentum penting dalam mewujudkan transformasi menuju negara maju dan berdaya saing tinggi.

5. SARAN

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi, pemerintah perlu meninjau kembali strategi alokasi anggaran infrastruktur secara lebih selektif dan jangka panjang. Proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap pemerataan wilayah, produktivitas nasional, dan kesejahteraan masyarakat sebaiknya dipertahankan bahkan dalam kondisi fiskal yang ketat.

Guna mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain: optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan (green bonds), dan pemanfaatan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund) sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Selain itu, penguatan tata kelola proyek infrastruktur menjadi penting, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi lintas kementerian dan antara pusat-daerah. Tanpa sinergi yang baik dalam perencanaan dan implementasi, pembangunan akan terus terfragmentasi dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Yang tak kalah penting, pemerintah perlu mengarahkan pembangunan infrastruktur pada pendekatan yang lebih inklusif. Artinya, selain membangun proyek besar di pusat pertumbuhan ekonomi, fokus juga harus diberikan pada infrastruktur dasar di daerah tertinggal dan wilayah strategis nasional. Pendekatan ini penting untuk menjamin pemerataan akses, mengurangi ketimpangan struktural, serta memperkuat keutuhan dan integrasi nasional.

Akhirnya, evaluasi secara berkala terhadap dampak pemangkasan anggaran perlu dilakukan, khususnya dalam kaitannya dengan capaian pembangunan jangka panjang seperti SDGs dan visi Indonesia Emas 2045. Evaluasi ini harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan pembangunan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apindo. (2024). Laporan tahunan investasi dan infrastruktur 2024. Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Statistik penanaman modal triwulan IV tahun 2023. Jakarta: BKPM.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator makro ekonomi Indonesia tahun 2023. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2023). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Ginting, R. (2020). Belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(3), 143–157.
- Global Infrastructure Hub. (2023). Infrastructure outlook report 2023. <https://outlook.gihub.org>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota keuangan dan APBN tahun anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Pratama, A. (2022). Ketidakstabilan anggaran infrastruktur dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 15(2), 201–217.

- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siregar, D., & Wahyuni, S. (2021). Investasi publik dan pengaruhnya terhadap infrastruktur transportasi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(4), 245–258.
- World Bank. (2023). Logistics performance index (LPI) 2023 report. <https://lpi.worldbank.org>.
- Istianto, A. (2025). Analisis penerapan teori pembangunan Rostow terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, 10(1), 45–58. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/jeppupr/article/view/19822>.
- Evangelista, D. C. (2024). Peran infrastruktur jalan terhadap pengurangan ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung. *Community Development Journal*, 5(3), 13233–13240. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/43180/27048/143607>.
- Katadata. (2025). Infrastruktur dan pelayanan publik paling terdampak pemangkasan anggaran. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/analisisdata/67c9585f51fdf/infrastruktur-dan-pelayanan-publik-paling-terdampak-pemangkasan-anggaran>.
- Pribady, D. (2024). Isu strategis dan tantangan pembangunan infrastruktur nasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 210–225. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/23541/pdf>.
- Kurniawan, B. (2023). Pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 3(2), 151–163. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JMD/article/download/353/218>.